



Hal Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hal Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MISKIN MELALUI PROGRAM KELUARGA
HARAPAN (PKH) DI DESA SIMPANG KOTA MEDAN,
KECAMATAN KELAYANG, KABUPATEN
INDRAGIRI HULU**

SKRIPSI



OLEH :

NURISMA
11770523353

PROGRAM S.1

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2021



Halaman ini dilindungi Undang-Undang
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©Halaman ini dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MISKIN MELALUI PROGRAM KELUARGA
HARAPAN (PKH) DI DESA SIMPANG KOTA MEDAN,
KECAMATAN KELAYANG, KABUPATEN INDRAGIRI
HULU**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral Comprehensive
Strata I Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Islam Negeri Sultan Syarif
Kasim Riau*



OLEH :

**NURISMA
11770523353**

PROGRAM S.1

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

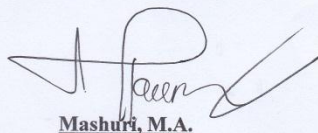
2021

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : NURISMA
 NIM : 11770523353
 PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM
 PEMBERDAYAAN MASYARAAAT MISKIN
 MELALUI PROGRAM KELUARGA HARAPAN
 (PKH) DI DESA SIMPANG KOTA MEDAN
 KECAMATAN KELAYANG KABUPATEN
 INDRAGIRI HULU

DISETUJUI OLEH
 DOSEN PEMBIMBING



Mashuri, M.A.


NIP. 19770721201411 1 002

DEKAN

Kampus Ekonomi dan Ilmu Sosial

Dr. H. Mahyarni, SE, MM
 NIP. 19700826 199903 2 001

KETUA PROGRAM STUDI
 Ilmu Administrasi Negara


Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.si.
 NIP. 19790101 200710 1 003

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

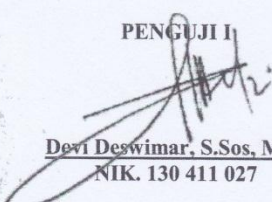
NAMA : NURISMA
NIM : 11770523353
PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : EKONOMI ILMU DAN SOSIAL
JUDUL : ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN
MELALUI PROGRAM KELUARGA
HARAPAN (PKH) DI DESA SIMPANG KOTA
MEDAN KECAMATAN KELAYANG
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
TANGGAL UJIAN : 23 JULI 2021

Disetujui Oleh
KETUA PENGUJI



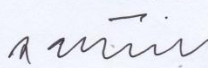
Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.si
NIP. 19790101 200710 1 003

PENGUJI I



Devi Deswimar, S.Sos, M.Si
NIK. 130 411 027

PENGUJI II



Mhd. Rafi, S.Sos, M.Si
NIK. 130 717 059

ABSTRAK

ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN MELALUI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA SIMPANG KOTA MEDAN, KECAMATAN KELAYANG, KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Oleh: Nurisma

Penelitian Ini dilaksanakan di Desa Simpang kota medan kecamatan Kelayang kabupaten Indragiri Hulu. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa pelaksanaan program pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Simpang Kota Medan, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu dan untuk mengetahui hambatan yang dialami dalam mencapai tujuan pemerdayaan masyarakat. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan penelitian dilakukan dengan teknik purposive sampling. Hasil analisis dari penelitian ini yaitu pemberdayaan masyarakat melalui program keluarga harapan di desa simpang kota medan kecamatan kelayang kabupaten indragiri hulu dikatakan cukup baik, dibuktikan dengan terbantunya masyarakat miskin dalam hal perekonomian, pendidikan, dan kesehatan oleh bantuan dari PKH ini. Hambatan yang dialami dalam pelaksanaan program ini adalah masih kurangnya pengetahuan KPM tentang manfaat bantuan yang diberikan, dan masih kurangnya pelatihan yang diberikan untuk mengasah keterampilan KPM agar lebih bisa mandiri dan masih kurang telitinya Pendamping Dan Aparat Desa dalam menyeleksi penerima bantuan PKH.

Keyword Kinerja: Pemberdayaan, PKH, Masyarakat Miskin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum wr.wb

Alhamdulillahiroilalamin, Segala Puji Dan Syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah swt, atas rahmad dan karunia-Nya yang tidak terkira. Semoga kita sebagai manusia yang *Dhoif* ini bisa selalu Istiqomah terhadap apa yang telah digariskan-Nya. Semoga kita selalu dalam ridha-Nya. Shalawat beriring salam setulus hati kepada baginda *Nabi Muhammad saw*, dan ahlul aitnya, sang reformis agung peradaban dunia yang menjadi *inspiring leader dan inspiring human* bagi umat di seluruh belahan dunia. Semoga syafa'atnya kelak menaungi kita di hari perhitungan kelak.

Puji syukur atas nikmat dan hidayah yang diberikan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan Skripsi dengan judul: “ Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Simpang Kota Medan, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu”.

Sebagaimana ketentuan yang berlaku penyusunan skripsi ini sebagai syarat untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar Strata 1 pada program S1 Ilmu Administrasi Negara Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kesalahan dan keraguan serta kekhilafan, untuk itu penulis memohon maaf kepada pembaca. Selanjutnya atas bimbingan dan bantuan serta doa yang diberikan, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kepada kedua orang tua yakni Ayahanda Busro dan Ibunda Robina yang selalu mendo'akan, restu, motivasi, dukungan dan nasehat sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan sempurna.
2. Bapak prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

3. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- Ibu Wakil Dekan I Dr. Leny Nofianti, MS, SE, Si, Ak.CA, Wakil Dekan II DR. Juliana, SE, M.Si dan pembantu Dekan III Dr. Amrul Mauzam, SHI, M.Ag Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
- Bapak Dr. Kamaruddin S.Sos., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Bapak Dr. Jhon Afrizal, SHI., MA selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Ibu Aadiana Ilosa, S.AP.MPA selaku Dosen Pembimbing Akademis, yang memberikan masukan dan arahan demi lancarnya Penulisan Skripsi ini.
- Bapak Mashuri, M.A. selaku Pembimbing Skripsi, yang memberikan masukan dan arahan demi lancarnya Penulisan Skripsi ini.
- Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
10. Seluruh Staf pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
11. Bapak Baharuddin selaku Kepala Desa Simpang Kota Medan
12. Ibu Luce Angraini S. Ikom selaku Pendamping PKH di Desa Simpang Kota Medan
13. Kepada seluruh Staf Dan Aparat Desa Simpang Kota Medan
14. Kepada seluruh Keluarga besar yang selalu membantu dan mendo'akan penulis khususnya Nenek tercinta Nurbaya, Mak uwo Nimar, pak ocik Ahmad Sauri S.Pdi , Ibu Anita, Adik Tercinta padli dan fauzan.
15. Terimakasih juga kepada Syahrul Aziz yang selalu suport tenaga dan juga pikirannya, selalu memotivasi penulis.
16. Terimakasih Kepada kak Nia, dan teman seperjuangan Nanda, Nora, Adelia, Yola yang selalu memberikan semangat kepada penulis



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

17. Terimakasih juga kepada sahabat Ferdilla, Roina, Afifah, Reni, Diah yang selalu memotivasi, mensupport, dan membantu penulis

18. Seluruh teman Ilmu Administrasi Negara yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas setiap kebersamaan, persaudaraan dan kekeluargaan yang kita miliki bersama.

19. Semua pihak yang telah turut membantu penulis, baik langsung maupun tidak langsung. Hanya terimakasih yang mampu penulis ucapkan.

Penulis hanya bisa mendo'akan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan doa'a, semoga Allah SWT berkenan membalas semua kebaikan kalian. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua masukan tersebut akan penulis jadikan sebagai motivator untuk berkarya dimasa yang akan datang. Akhir kata, semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat baik pembaca. *Aamiin yaa Raal'Alamin.*

Pekanbaru, 8 Juli 2021

NURISMA
11770523353

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Batasan Penelitian	7
1.6 Sistematika Penulisan.....	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kebijakan Publik.....	10
2.2 Pemberdayaan Masyarakat Miskin	11
2.3 Permensos No. 1 Tahun 2018 tentang PKH.....	11
2.4 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat	14
2.5 Indikator-Indikator Masyarakat Miskin	16
2.6 Program Keluarga Harapan.....	18
2.7 Landasan Hukum Program Keluarga Harapan (PKH)	21
2.8 Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) Bantuan Dana Tunai	22
2.9 Besarnya Bantuan Tunai Program Keluarga Harapan (PKH)	27
2.10 Pendamping PKH.....	30
2.11 Pandangan Islam Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program PKH.....	33
2.12 Penelitian Terdahulu	37
2.13 Defenisi Konsep	38
2.14 Kerangka Pemikiran.....	39

2.15 Variabel/Indikator Penelitian	39
METODE PENELITIAN	
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	41
3.2 Jenis dan Sumber Data	41
3.3 Teknik Pengumpulan Data	42
3.4 Informan Penelitian	43
3.5 Populasi dan Sampel	44
3.6 Teknik Analisa Data	46
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
4.1 Identifikasi Desa Simpang Kota Medan	47
4.1.1 Sejarah berdirinya Desa Simpang Kota Medan	47
4.1.2 Keadaan Penduduk	48
4.1.3 Keadaan Pendidikan Dan Sosial Agama	49
4.1.4 Mata Pencarian Penduduk	53
4.1.5 Adat Istiadat	55
4.2 Deskripsi Unit Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)	55
HASIL DAN PEMBAHASAN	
5.1 Identifikasi informan Penelitian	58
5.2 Analisis Pemerdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Simpang Kota Medan Kecamatan Kelayang Kaupaten Indragiri Hulu	59
5.2.1 Meningkatkan Status Sosial Ekonomi RTM	61
5.2.2 Meningkatkan Status Kesehatandan Gizi Ibu Hamil, Ibu Nifas, Anak Balita Dan Anak 5-7 Tahun Yang Belum Masuk Sekolah Dasar	64
5.2.3 Meningkatkan Akses Dan Kualitas Pendidikan Anak-Anak RTM	68

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.2.4	Meningkatkan Perubahan Perilaku Dan Kemandirian KPM Dalam Mengakses Layanan Kesehatan Dan Pendidikan Serta Kesejahteraan Sosial	72
5.2.5	Mengurangi Beban Pengeluaran Dan Meningkatkan Pendapatan Keluarga Miskin	76
5.3	Hambatan Dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Simpang Kota Medan Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu	80
BAB 6 PENUTUP		
5.1	Kesimpulan.....	84
5.2	Saran.....	85

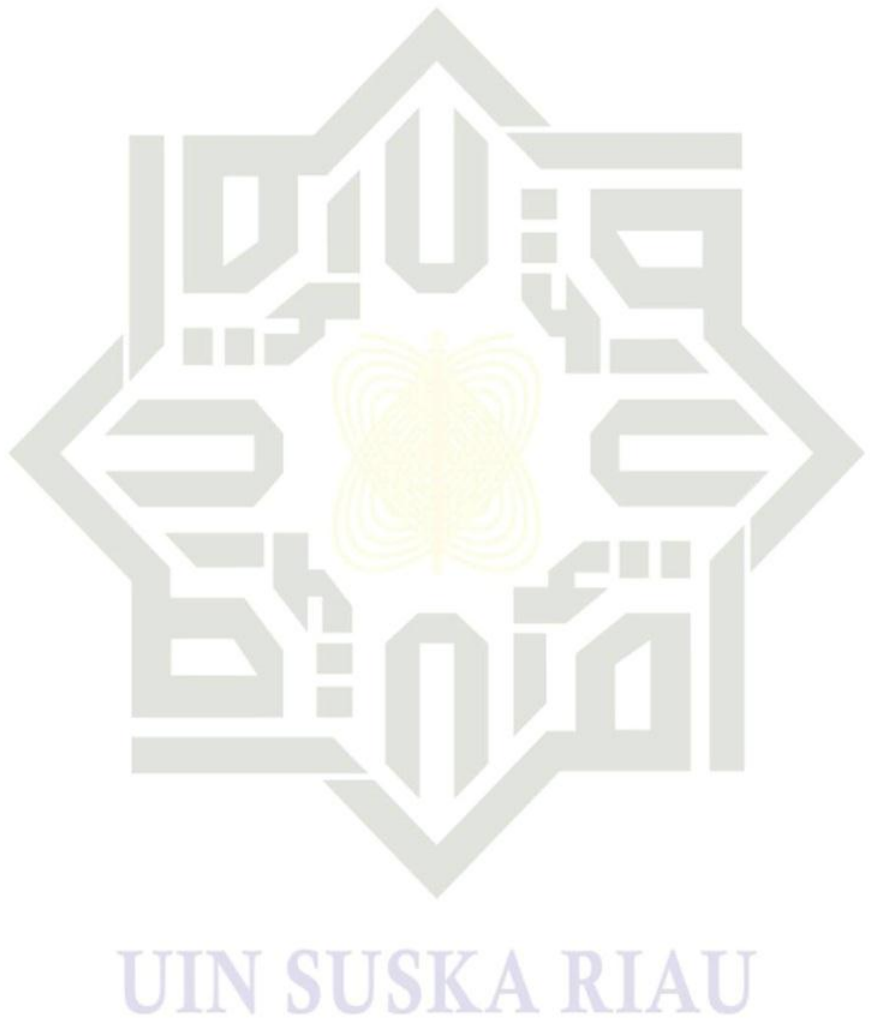
DAFTAR PUSTAKA
DOKUMENTAS
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Hak Cipta	Besar Bantuan Pkh	5
2. Hak Cipta	Besar Bantuan Penerima Bantuan Dana Tunai Pkh	27
3. Hak Cipta	Area Perubahan Dan Hasil Yang Di Harapkan	39
4. Hak Cipta	Key Informan Penelitian	44
5. Hak Cipta	Jumlah Penduduk Dan Rumah Tangga Berdasarkan Klasifikasi Kesejahteraan	49
6. Hak Cipta	Jumlah Tingkat Pendidikan Akhir	50
7. Hak Cipta	Sarana Pendidikan Formal	51
8. Hak Cipta	Pendidikan Non Formal	52
9. Hak Cipta	Sarana Ibadah Di Desa Simpang Kota Medan	53
10. Hak Cipta	Jenis Pencarian Masyarakat Desa Simpang Kota Medan	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1 Pertemuan Bulanan Pendamping Dan KPM	68
Gambar 5.2 Posyandu Bulanan KPM	76



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara dengan jumlah penduduk yang banyak dan wilayah geografis yang luas. Saat ini penduduk Indonesia sekitar 269 juta jiwa dan di anugrahi dengan Sumber Daya Alam yang melimpah.

Tetapi sungguh suatu yang ironis menurut Data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2020 Dimana terdapat 9,78 persen penduduk Indonesia saat ini hidup dibawah garis kemiskinan. Kemiskinan pada hakikatnya menunjukkan pada situasi kesengsaraan dan ketidak berdayaan yang dialami seseorang, baik ketidak mampuaannya memenuhi kebutuhan hidup, maupun akibat ketidakmampuan negara memberikan perlindungan sosial kepada rakyatnya. Dampak yang ditimbulkan dari kemiskinan ini diantaranya anak-anak putus sekolah, dan tingkat kriminalitas meningkat.

Keluarga yang tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan dasar dalam hidupnya dapat dikategorikan sebagai keluarga miskin. Keluarga miskin adalah orang-orang yang terhubung melalui darah, pernikahan, atau adopsi dan tinggal bersama, dimana rata-rata pengeluaran per kapita per bulan masing-masing orang tersebut berada dibawah garis kemiskinan yang membuat mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan minimum untuk keperluan fisik dan kebutuhan dasar lainnya (Hanum, 2010).

Permasalahan kemiskinan sangatlah memerlukan penanganan secara sungguh-sungguh untuk menghindari kemungkinan merosotnya mutu generasi



(lost generation) dimasa mendatang. Dalam hal ini, pemerintah mempunyai peran yang sangat penting dalam melakukan penanggulangan kemiskinan dan mensejahterakan masyarakatnya. Dimana untuk mencapai kesejahteraan hidup masyarakat, tugas pemerintah membuat perencanaan dan melaksanakan program yang tepat untuk masyarakat. Pemberian bantuan seperti pencairan dana sangat dibutuhkan demi keberlangsungannya kehidupan keluarga miskin, selain itu pengadaan pembekalan keterampilan dengan melalui pemberdayaan juga dapat memberikan kemampuan dasar bagi keluarga. Pemberdayaan digunakan karena diyakini sumber masalah kemiskinan dan keterbelakangan adalah ketidakberdayaan (Soetomo, 2011). Salah satu program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), dimana program ini berharap dapat membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhannya dibidang kesehatan dan pendidikan dan bisa memberdayakan hidupnya. Di indonesia jumlah penerima PKH Tahun 2019 sebanyak 9.841.270 KPM, di Desa Simpang Kota Medan Kecamatan Kelayang penerima PKH sebanyak 75 KPM dari 1709 KK.

Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu program pemberian bantuan sosial kepada keluarga penerima manfaat (KPM) berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan kewajibannya. Persyaratan tersebut dapat berupa kehadiran di fasilitas pendidikan (misalnya bagi anak usia sekolah), ataupun kehadiran di fasilitas kesehatan (misalnya bagi anakbalita, atau bagi ibu hamil). Program Keluarga Harapan (PKH) terdiri dari jenis kegiatan program yang dilakukan PKH yang diantaranya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yaitu jaminan kesehatan Nasional (JKN). Program Indonesia Pintar (PIP), Bansos Rastra, Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dan Bantuan Dana Tunai.

Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu program pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin/ RTSM berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan kewajibannya Program Keluarga Harapan difokuskan untuk meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat miskin melalui pemberdayaan masyarakat kaum ibu, dan mendorong agar anaknya tetap bersekolah sesuai dengan data yang ditetapkan oleh Bps sebagai target peserta. Melalui PKH bantuan dana tunai, KPM mendorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan dan pendidikan, pangan, dan gizi, perawatan dan pendamping. PKH bantuan dana tunai diarahkan untuk menjadi tulang punggung dalam pemberdayaan masyarakat miskin.

Pemerintah melalui Departemen Sosial (Depsos) bersama lintas sektoral mulai bulan juli 2007 dilaksanakan program keluarga harapan (PKH). Program Keluarga Harapan (PKH) di launching secara resmi oleh Menteri Sosial dan Pemerintah Daerah pada tanggal 25 Juli 2007 di Gorontalo. Jadi di Indonesia sudah berjalan sejak 2007. Namun di Kecamatan Kelayang Tepatnya didesa Simpang Kota Medan dapat menjalankan Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu pada tahun 2011.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa Simpang Kota Medan merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Kelayang yang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani, pedagang, dan sebagai pegawai itupun hanya sedikit. Dalam pemenuhan kebutuhannya masyarakat masih susah untuk memenuhi kebutuhannya baik itu sandang, pangan, dan papan. Kepala rumah tangga di Desa Simpang Kota Medan ada juga bekerja sebagai kuli bangunan yang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka masih tidak cukup. Ini membuktikan bahwa masih banyak masyarakat dengan situasi sosial ekonomi yang masih rendah.

Berdasarkan observasi awal dilokasi penelitian Desa Simpang Kota Medan yang mendapatkan manfaat dari program PKH di Desa Simpang Kota Medan Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu, yaitu sebanyak 75 KPM, yang terbagi dalam 5 dusun. Tetapi masih banyak terdapat salah sasaran dalam memilih orang yang mendapatkan manfaat dari PKH, banyak yang mendapatkan PKH adalah keluarga dalam kategori menengah ke atas, tidak adanya dibuat program pembelajaran kewirausahaan untuk mengajarkan penerima manfaat PKH untuk berkembang, dan juga masih ada sebagian masyarakat penerima manfaat PKH bantuan dana tunai belum mengetahui sepenuhnya fungsi utama bantuan dana tunai tersebut. Kadang masyarakat penerima manfaat PKH bantuan dana tunai tersebut mereka membelanjakan uang tersebut untuk keperluan pribadi, dan juga untuk membeli rokok suami, sedangkan uang tersebut diberikan salah satunya bertujuan mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dibidang kesehatan maupun dibidang



pendidikan. Tapi kenyataannya Bantuan Dana Tunai PKH ini digunakan untuk kebutuhan sandang mereka, ini terjadi akibat faktor kemiskinan.

Dalam observasi awal penulis mengadakan wawancara dengan beberapa orang penerima manfaat PKH pada bulan oktober 2020 diantaranya ibu Eli, mengatakan bahwa uang yang diterima sejumlah 450.000 hanya mampu memenuhi kebutuhan sementara seperti membeli kebutuhan sembako. Demikian halnya ibu Ipep Sukarni mengatakan bahwa harapannya dapat membantu biaya kebutuhan pendidikan anak dan kesehatan namun sangat jauh dari kebutuhan tersebut karena uang bantuan itu juga digunakan untuk membeli bahan pokok dan sembako. Penulis juga melakukan wawancara kepada masyarakat yang tergolong miskin tetapi tidak mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan ini, penulis melakukan wawancara kepada ibu yatini, ia mengatakan tidak mendapatkan program PKH padahal ia tidak memiliki rumah yang layak untuk di huni, dan ibu ini memiliki 2 anak balita dan 1 lansia yang dia urus, tetapi karena ketidak telitian pemerintah dalam mendata maka ibu yatini ini tidak mendapatkan bantuan PKH. Dari jumlah penduduk miskin yang berjumlah 95 KK yang mendapatkan program PKH ini hanya 75 dan masih banyak yang salah sasaran, setidaknya masih ada 30 KK yang tergolong miskin tidak mendapatkan bantuan PKH ini. Besarnya bantuan PKH pada 2020 adalah:

Tabel 1.1 Besar Bantuan PKH

No	Komponen Bantuan	Indeks Bantuan (Rp)
1	Bantuan ibu hamil/menyusui	Rp. 2.400.000



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2	Bantuan anak usia dibawah 6 tahun	Rp. 750.000
1.	Bantuan peserta pendidik setara SD/Sederajat	Rp. 900.000
	Bantuan peserta pendidik setara SMP/Sederajat	Rp. 1.500.000
	Bantuan peserta pendidik setara SMA/Sederajat	Rp. 2.000.000
	Bantuan peyandang disabilitas berat	Rp. 2.400.000
	Bantuan lanjut usia 70 tahun keatas	Rp. 2.400.000

Sumber: Data Kantor Desa Simpang Kota Medan Tahun 2020

Penyaluran bantuan PKH ini di salurkan setiap 3 bulan sekali, dan mengambil bantuan ke E-Warung yang telah di tetapkan oleh Pendamping PKH, dan pengambilan bantuan berupa bahan pokok yang dibutuhkan oleh KPM.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang ada dilapangan, pentingnya untuk dieliti permasalahan ini agar mengetahui penyebab salah sasaran penerima bantuan PKH, dan penyebab kurangnya pengetahuan tentang fungsi bantuan PKH yang diberikan. Maka penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam permasalahan ini dengan judul: **“ANALISIS PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN MELALUI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) di DESA SIMPANG KOTA MEDAN KECAMATAN KELAYANG KABUPATEN INDRAGIRI HULU”**.

1.2 Rumusan Masalah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan permasalahan yang diungkapkan pada latar belakang, maka penulis dalam penelitian merumuskan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui PKH Di Desa Simpang Kota Medan Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu?
2. Apa Hambatan Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui PKH Di Desa Simpang Kota Medan Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui PKH Di Desa Simpang Kota Medan Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu
2. Untuk Mengetahui Hambatan Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui PKH Di Desa Simpang Kota Medan Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu

1.4 Manfaat Penelitian

1. Menambah Wawasan Keilmuan Peneliti Dibidang Kebijakan Publik
2. Memberikan Rekomendasi Kepada Dinas Sosial Tentang Pelaksanaan Pemberdayaan Kebijakan Publik
3. Menjadi Referensi Bagi Peneliti Berikutnya Tentang Kajian Pemberdayaan Kebijakan Publik

1.5 Batasan Penelitian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Agar penelitian ini tidak terlalu luas dan jelas ruang lingkupnya maka dikemukakan batasan penelitian sebagai berikut:

1. Pada analisis ini peneliti memfokuskan pada pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui program PKH
2. Penelitian ini dilakukan di Desa Simpang Kota Medan Kecamatan Kelayang

6 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan penelitian ini secara keseluruhan terdiri dari 3 bab dan sub lainnya, meliputi:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian, Dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Bab Ini Membahas Teori-Teori Yang Berhubungan Dengan Permasalahan Yang Dibahas, Teori Yang Diangkat Penulis Yaitu Mengenai Teori-Teori Tentang Pemberdayaan Masyarakat Penerima Manfaat PKH.

BAB III : Metode Penelitian

Bab Ini Menjelaskan Tentang Lokasi Penelitian, Jenis Dan Sumber Data, Instrumen Penelitian, Teknik Pengumpulan Data Dan Analisis Data.

BAB 4 : Gambaran Umum Objek penelitian



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab ini berisikan gambaran umum mengenai Desa Simpang Kota Medan dan Program Keluarga Harapan.

BAB 5 : Hasil Dan Pembahasan

Bab ini berisikan tentang hasil dari penelitian tentang pembahasan yang dilakukan. Dalam hal ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Simpang Kota Medan Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu

Bab 6 : Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari penelitian yang penulis lakukan serta memberikan saran-saran yang dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada pihak Pendamping Dan Kpm PKH serta Aparat Desa.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kebijakan Publik

Menurut Wahab (2005:3) kebijakan merupakan suatu tindakan berpola yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang dan bukan sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu. Sementara itu , Soenarko (2000:35), mengutip pendapatnya Woyowasito dan Purwodarminto, menjelaskan bahwa kebijakan itu menunjukkan adanya kemampuan atau kualitas yang dimiliki seseorang dalam keadaan yang *learned* (terpelajar), *prident* (baik), dan *exprienced* (berpengalaman), yang berarti bahwa kebijakan adalah *skill* (keterampilan), *ability* (kemampuan), *capability* (kecakapan), dan *insight* (kemampuan untuk memahami sesuatu).

Bebrbagai defenisi tentang kebijakan publik banyak diungkapkan oleh para pakar dan ahli kebijakan. Bahwa kebijakan publik itu adalah suatu keputusan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk kepentingan bersama. Setiap kebijakan publik tentunya mempunyai proses formulasi dan evaluasi yang mengikutinya. Eksekusinya berada pada level implementasi kebijakan. Semua proses kebijakan publik saling mempengaruhi satu sama lainnya, tidak bisa saling melemahkan, tetapi sebaliknya harus saling menguatkan, sehingga kebijakan berjalan secara baik dan optimal.



2.2 Pemberdayaan Masyarakat Miskin

Pemberdayaan Masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *people-centered, participatory*, dalam kerangka ini upaya untuk memberdayakan masyarakat (empowering) dapat dikaji dari 3 aspek. **Pertama**, enabling yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang. **Kedua**, empowering yaitu memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai input dan pembukaan dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat semakin berdaya. **Ketiga**, protecting yaitu melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah.

Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat bawah (*grass root*) yang dengan segala keterbatasannya belum mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan, kebodohan dan kelatarbelakangan, sehingga pemberdayaan masyarakat tidak hanya penguatan individu tetapi juga pranata-pranata sosial yang ada. Menambahkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, tanggung jawab adalah bagian penting dalam upaya pemberdayaan.

Kebijakan pemerintah tentang pemberdayaan masyarakat secara tegas dalam GBHN Tahun 1999 dan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dalam GBHN tahun 1999, khususnya didalam “Arah Kebijakan Pembangunan Daerah” antara lain dinyatakan “ mengembangkan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat dan lembaga swadaya masyarakat serta seluruh potensi masyarakat dalam wadah NKRI”.

Dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah anatara lain ditegaskan bahwa “ hal-hal yang mendasar dalam undang-undang ini adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan kembangkan prakarsa dan kreatifitas serta meningkatkan peran serta masyarakat.

Menurut (sumodiningrat, 2007:107) pemberdayaan masyarakat berarti meningkatkan kemampuan atau meningkatkan kemandirian masyarakat. Dalam kerangka pembangunan nasional, upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari sisi: pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang. Kedua, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membangun melalui berbagai bantuan dana, pelatihan, pembangunan prasarana dan sarana baik fisik maupun sosial, serta pengembangan kelembagaan di daerah. Ketiga, melindungi/memihak yang lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang dan menciptakan kemitraan saling menguntungkan.

Menurut sumodiningrat (2004:41) pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, dan kemudian dilepas untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak jatuh lagi. Meskipun demikian dalam dalam rangka menjaga kemandirian tersebut tetap

dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi, dan kemampuan secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi.

Menurut Ite, pemberdayaan adalah menyiapkan kepada masyarakat berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat didalam menentukan masa depan mereka, serta berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan dalam komunikasi masyarakat itu sendiri.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkat kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain pemberdayaan adalah kemampuan dan memandirikan masyarakat.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka penulis menyimpulkan pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu berdiri sendiri dengan keterampilan dan pengetahuan yang dimilikinya untuk mengatasai masalah-masalah mereka sendiri, meningkatkan kualitas hidup, mencapai kesejahteraan dan memperbaiki kehidupannya dalam masyarakat.

2.3 Permenkos No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan

Pada Tahun 2018 Kementrian Sosial RI mengeluarkan regulasi baru tentang PKH, yaitu Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan ditetapkan di Jakarta oleh Menteri Sosial Khofifah Parawansa pada 8 Januari 2018, dan diberlakukan serta diundang oleh

Kemenkumham dalam Berita Negara RI Tahun 2018 Nomo 187, pada tanggal 9 Januari 2018.

Peraturan ini dibuat untuk mencabut Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan diterbitkan dengan pertimbangan bahwa:

- a. Untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan melalui peningkatan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, serta perlu program perlindungan sosial yang terencana, terarah, dan berkelanjutan.
- b. Peraturan menteri sosial No. 10 Tahun 2017 tentang PKH belum mengakomodasi kebutuhan Program Keluarga Harapan, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan
- c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Program Keluarga Harapan.

Pada pasal 3 dalam Permenssos ini, sasaran PKH meruakan keluarga atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.

2.4 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam UU Nomomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 dan Program

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dinyatakan bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penguatan lembaga dan organisasi masyarakat setempat, penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial masyarakat, peningkatan keswadayaan masyarakat luas guna membantu masyarakat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial dan politik.

Pemberdayaan adalah kondisi dimana mereka memiliki kesamaan hak dan kewajiban yang terwujud dalam kesempatan, kedudukan, peranan yang dilandasi sikap dan perilaku saling membantu dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat. Upaya pemberdayaan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintahan maupun lembaga swadaya masyarakat. Pemberdayaan yang dilakukan memiliki dampak keberdayaan masyarakat untuk keluar dari hambatan struktural, sehingga masyarakat yang berdaya ini nantinya dapat mengaktualisasikan potensi diri dan kapasitasnya untuk menghadapi tantangan eksternal sebagai dampak dari pembangunan.

Sedangkan menurut Suharto, tujuan dari pemberdayaan masyarakat menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu meningkatkan masyarakat yang tidak berdaya menjadi berdaya dan memperkuat kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti mempunyai kepercayaan diri, maupun menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas kehidupannya.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5 Indikator-Indikator Masyarakat Miskin

Masyarakat miskin pada dasarnya terdiri dari keluarga yang tingkat pendapatan dan penghasilan ekonominya adalah relative rendah. Menurut Soemardjan, ia mendeskripsikan berbagai cara pengukuran kemiskinan dengan standar yang berbeda-beda, dengan tetap memperhatikan dua kategori tingkat kemiskinan yakni, kemiskinan absolut adalah suatu kondisi dimana tingkat pendapat seseorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. Yang kedua adalah kemiskinan relatif adalah penghitungan kemiskinan berdasarkan proporsi distribusi pendapatan dalam suatu daerah.

Berdasarkan indikator yang digunakan oleh BPS, rendahnya tingkat penghasilan dan pendapatan ekonomi masyarakat atau yang disebut masyarakat miskin tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu sebagai berikut:

a. Rendahnya pendapatan per kapita

Pendapatan per kapita menyatakan besarnya rata-rata pendapatan masyarakat di suatu daerah selama kurun waktu 1 tahun. Besarnya pendapatan per kapita (income per capita) dari besarnya output dibagi oleh jumlah penduduk disuatu daerah untuk kurun waktu 1 tahun. Indikator pendapatan per kapita menerangkan terbentuknya pemerataan pendapatan yang merupakan salah satu indikasi terbentuknya kondisi yang disebut miskin.

b. Rendahnya pendidikan

Kemiskinan adalah ketidak mampuan individu dalam memenuhi kebutuhan pokok yakni, sandang, pangan, dan papan. Rendahnya pendidikan juga termasuk dari indikator kemiskinan. Dampak yang ditimbulkan dari kemiskinan antaranya anak-anak akan putus sekolah dan tingkat kriminalitas akan meningkat.

c. Keadaan kesehatan yang buruk

Dari berbagai data kemiskinan yang dihimpun menyebutkan adanya keterkaitan antara kemiskinan dan kualitas kesehatan masyarakat. Rendahnya kemampuan pendapatan dalam mencukupi/ memenuhi kebutuhan pokok menyebabkan keterbatasan kemampuan untuk menjangkau atau memperoleh standar kesehatan yang ideal/layak baik dalam bentuk gizi maupun pelayanan kesehatan yang memadai. Dampak dari kondisi seperti ini adalah tingginya resiko terhadap kondisi kekurangan gizi dan kerentanan atau resiko terserang penyakit menular. Kelompok masyarakat yang disebut miskin juga memiliki keterbatasan untuk mendapat pelayanan kesehatan/pengobatan yang memadai sehingga akan menyebabkan resiko kematian yang tinggi.

d. Rumah yang tidak permanen

e. Sempitnya luas tanah yang ditempati

f. Lingkungan keluarga yang tidak sehat

g. Fasilitas air minum

h. Fasilitas jembatan/wc

2.6 Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program lintas Kementrian dan Lembaga, karena aktor utamanya adalah dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, Departemen Komunikasi dan Informatika, Dan Badan Pusat Statistik. Untuk mensukseskan program tersebut, maka dibantu oleh Tim Ahli PKH dan konsultan Word Bank. PKH dirancang untuk membantu penduduk miskin kluster pertama yaitu Bantuan dan Perlindungan Sosial Kelompok Sasaran, yaitu berupa **bantuan** tunai bersyarat. Dengan PKH diharapkan Rumah Tangga Sangat Miskin penerima bantuan (selanjutnya disebut RTSM) memiliki akses yang baik untuk memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi termasuk menghilangkan kesenjangan sosial, ketidak berdayaan dan keterasingan sosial yang selama ini melekat pada warga miskin.

Program Keluarga Harapan (PKH) bantuan dana tunai merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin (KM) yang telah ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) atau dikenal dengan Program Keluarga Harapan (PKH). PKH bantuan dana tunai bukan merupakan lanjutan Program Subsidi Langsung Tunai yang sudah berlangsung selama ini dalam rangka membantu RTM mempertahankan daya beli pada saat pemerintah melakukan penyesuaian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harga BBM. PKH bantuan dana tunai lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem Perlindungan Sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memutus rantai kemiskinan yang terjadi selama ini. PKH bantuan dana tunai merupakan program bantuan dan perlindungan sosial yang termasuk dalam klaster I strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan dasar bagi Lansia dan penyandang Disabilitas Berat. Pelaksanaan PKH juga mendukung pencapaian tujuan pembangunan *Millenium*. Lima komponen tujuan *Millenium Development Goals* (MDGs) yang akan terbantu oleh PKH yaitu: pengurangan penduduk miskin dan kelaparan, pendidikan dasar, kesetaraan jender, pengurangan angka kematian bayi dan balita, pengurangan penduduk miskin dan kelaparan, pendidikan dasar, kesetaraan jender, pengurangan angka kematian bayi dan balita, pengurangan angka kematian ibu melahirkan.

Program Keluarga Harapan (PKH) bantuan dana tunai adalah Program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program perlindungan sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah *conditional cash transfer* (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis. Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH bantuan dana tunai

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (Faskes) dan Fasilitas Pendidikan (Fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI.

Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu program pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin/RTSM berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan kewajibannya. Program Keluarga Harapan (PKH) bantuan dana tunai difokuskan untuk meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat miskin melalui pemberdayaan masyarakat kaum ibu, dan mendorong agar anaknya tetap bersekolah sesuai dengan data yang ditetapkan oleh BPS sebagai target peserta. Program Keluarga Harapan (PKH) lebih kepada memotong rantai kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusianya.

Melalui PKH bantuan dana tunai, KPM didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan dan pendamping, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi tulang punggung penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan sosial nasional.

Berdasarkan data dari Kementerian Sosial, Sasaran PKH bantuan dana tunai merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



terpadu pogram penanganan fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan dengan kriteria ibu hamil/menyusui, ank berusia nol sampai dengan enam tahun. Komponen pendidikan dengan kriteria anak SD/MI atau sederajat, anak SMP/MTS atau sederajat, anak SMA/MA atau sederajat, dan anak usia enam sampai 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Sejak 2016 terdapat penambahan komponen kesejahteraan sosial dengan kriteria lanjut usia yang diutamakan mulai dari 70 tahun dan penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

Penyaluran bantuan sosial PKH diberikan kepada KPM yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jaminan Sosial Keluarga. Penyaluran bantuan dana tunai diberikan empat tahap dalam satu tahun.

2.7 Landasan Hukum Program Keluarga Harapan (PKH)

Terdapat beberapa landasan hukum tentang pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) anatara lain sebagai berikut:

1. Undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
2. UU nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
3. Undang-undang nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
4. Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangi Kemiskinan
5. Inpres nomor 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan poin lampiran ke 1 tentang penyempurnaan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Inpres nomor 1 tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Korupsi poin lampiran ke 46 tentang Pelaksanaan Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH).
7. Keputusan menteri sosial RI No 53/ HUK/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja BBPPKS
8. Keputusan Menteri sosial RI No 29 tahun 2003 tentang Pendidikan dan Pelayanan Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial
9. Keputusan menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, No :31/KEP/MENKO/-KESRA/2007 tentang Tim Pengendali Program Keluarga Harapan (PKH) tanggal 21 September 2007
10. Keputusan menteri sosial RI No. 02A/HUK/2008 tentang Tim Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2008 tanggal 08 januari 2008
11. Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) provinsi/TKPKD
12. Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten/Kota/TKPKD
13. Surat Keputusan Bupati untuk berpartisipasi dalam Program Keluarga Harapan (PKH).

2.8 Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) Bantuan Dana Tunai

Tujuan umum Program Keluarga Harapan (PKH) bantuan dana tunai adalah untuk mengurangi angka kemiskinan dan memutus mata rantai

kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah perilaku RTM yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan, terutama pada kelompok RTM. Tujuan khusus PKH meliputi hal yaitu:

1. Meningkatkan status sosial ekonomi RTM.
2. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak balita dan anak usia 5-7 tahun yang belum masuk sekolah dasar.
3. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi anak-anak RTM.
4. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial.
5. Menurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin.

Hak dan Kewajiban Peserta PKH Bantuan Dana Tunai

Agar dapat memperoleh bantuan tunai, peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan dan komitmen untuk ikut berperan aktif dalam kegiatan pendidikan anak dan kesehatan keluarga, terutama ibu dan anak. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh peserta PKH adalah sebagai berikut:

1. Kesehatan

Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan kesehatan yang sudah ditetapkan dalam protokol pelayanan kesehatan seperti dibawah ini:

Anak usia 0-6 tahun:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Anak usia 0-28 hari (*neonatus*) harus diperiksa kesehatannya sebanyak 3 kali .

Anak usia 0-11 bulan harus diimunisasi lengkap (BCG, DPT, Polio, Campak, Hepatis B) dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan.

Anak usia 6-11 bulan harus mendapat vitamin A minimal sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu bulan februari dan agustus. Anak usia 12-59 bulan perlu mendapatkan imunisasi tambahan dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan.

d. Anak usia 5-6 tahun ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan untuk dipantau tumbuh kembangnya dan atau mengikuti program pendidikan Anak Usia Dini (PAUD/*Early Childhood Education*) apabila dilokasi/posyandu terdekat terdapat fasilitas PAUD.

Ibu hamil dan nifas:

Selama kehamilan, ibu hamil harus melakukan pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan sebanyak 4 (empat) kali, yaitu sekali pada usia kehamilan 0-3 bulan, sekali pada usia kehamilan 4-6 bulan, dua kali pada kehamilan 7-9 bulan, dan mendapatkan suplemen tablet Fe.

Ibu melahirkan harus ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.

Ibu nifas harus melakukan pemeriksaan/diperiksa kesehatan dan mendapatkan pelayanan KB paca persalinan setidaknya 3 (tiga) kali pada minggu I, IV, dan VI.

Apabila anak tersebut bekerja, atau disebut Pekerja Anak (PA) atau telah meninggalkan sekolah dalam waktu yang cukup lama, maka data anak tersebut akan didaftarkan dan disampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota untuk mendapatkan Program Pengurangan Pekerja Anak.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Apabila anak tersebut terpaksa di jalanan, atau disebut Anak Jalanan (AJ) dan telah meninggalkan sekolah dalam waktu yang cukup lama, maka data anak tersebut akan didaftarkan dan disampaikan kepada Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota untuk mendapatkan Program Kesejahteraan Sosial Anak.

3. Lansia 70 Tahun Keatas

- a. Pemeriksaan kesehatan oleh tenaga kesehatan yang dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan atau mengunjungi puskesmas santun lanjut usia (jika tersedia)
- b. Mengikuti kegiatan sosial (*day care*)

4. Penyandang Disabilitas Berat

- a. Pemeliharaan kesehatan sesuai kebutuhan
- b. Pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan melalui kunjungan rumah (*home care*)

Bila persyaratan diatas kesehatan, pendidikan, pemenuhan kebutuhan pokok lansia dan penyandang disabilitas berat dapat dilaksanakan secara konsisten oleh peserta PKH, maka mereka akan memperoleh bantuan secara teratur dan memiliki hak-hak sebagai anggota, hak-hak peserta PKH adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan bantuan uang tunai yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan program.
2. Mendapatkan layanan dan fasilitas kesehatan dan pendidikan bagi seluruh anggota keluarga.

3. Terdaftar dan mendapat program-program komplementaris dan sinergitas penanggulangan kemiskinan lainnya.
4. Bagi lansia diatas 70 tahun dan penyandang disabilitas berat mendapat pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan.

2.9.4 Besarnya Bantuan Tunai Program Keluarga Harapan (PKH)

Besarnya bantuan PKH pada setiap komponen berbeda. Besarnya bantuan untuk setaip RTM peserta PKH mengikuti skenario bantuan yang disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1 Besaran Bantuan Penerima Bantuan Dana Tunai PKH

No	Komponen Bantuan	Indeks Bantuan (Rp)
1	Bantuan ibu hamil/menyusui	Rp. 2.400.000
2	Bantuan anak usia dibawah 6 tahun	Rp. 750.000
3	Bantuan peserta pendidik setara SD/Sederajat	Rp. 900.000
4	Bantuan peserta pendidik setara SMP/Sederajat	Rp. 1.500.000
5	Bantuan peserta pendidik setara SMA/Sederajat	Rp. 2.000.000
6	Bantuan peyandang disabilitas berat	Rp. 2.400.000
7	Bantuan lanjut usia 70 tahun keatas	Rp. 2.400.000

Sumber: Data Kantor Desa Simpang Kota Medan Tahun 2020

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa besaran bantuan setiap komponen berbeda-beda. Apabila besar bantuan yang diterima RTM melebihi batas maksimum/dalam satu keluarga memiliki lebih dri 4 komponen penerima bantuan (bantuan minimum per RTM Rp. 750.000, bantuan maksimum per RTM Rp. 2.400.000) maka bantuan yang diberikan adalah komponen yang menerima bantuan dengan nominal paling besar.

Pembayaran bantuan dilakukan dalam dua sampai empat tahap dalam satu tahun yang dijadwalkan untuk dilakukan pada bulan Maret-Juni-September-November. Hal ini merupakan ketentuan dari pemerintah pusat. Jadwal pembayaran masing-masing kecamatan yang diputuskan oleh Unit Pengelola Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Lembaga Pembayaran. Pembayaran pertama untuk peserta baru tidak diperlukan verifikasi kepatuhan Peserta PKH.

Dana bantuan Tunai langsung dibayarkan kepada Peserta PKH melalui rekening bank/wesel/giro online (GOL). Pengurus Peserta PKH pada Lembaga Pembayaran dan diambil langsung oleh Peserta PKH. Pada saat pembayaran pendamping wajib memastikan kesesuaian antara Kartu Peserta PKH dengan Kartu Identitas (KTP) serta menumpulkan bukti pembayaran (RS2B atau slip penarikan). Agar RTM bisa menerima haknya maka setiap RTM wajib menjalankan kewajibannya selaku peserta PKH. Apabila peserta tidak memenuhi komitmennya dalam tiga bulan, maka besaran bantuan yang diterima akan berkurang dengan rincian sebagai berikut:



- a. Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam satu bulan, maka bantuan akan berkurang sebesar Rp 50.000
- b. Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam dua bulan, maka akan berkurang sebesar Rp 100.000
- c. Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam dua bulan, maka akan berkurang sebesar Rp 150.000
- d. Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam 3 bulan berturut-turut
- e. Maka tidak akan menerima bantuan dalam satu periode pembayaran.
- f. Ketentuan diatas berlaku secara tanggung renteng untuk seluruh anggota keluarga penerima bantuan PKH.

Adapun Tahapan penyaluran bantuan PKH, sebagai berikut:

- a. Peserta PKH lama
Bantuan diberikan kepada peserta PKH sebanyak 4 tahapan dalam setahun, khusus pada tahap II, selain mendapatkan bantuan berdasarkan komponen, peserta PKH juga mendapatkan bantuan tetap.
- b. Peserta PKH baru
Bantuan pertama kali diberikan kepada peserta PKH pada penyaluran tahap IV yang dilakukan pada bulan November atau Desember pada tahun berjalan. Pada penyaluran bantuan tersebut, peserta PKH mendapat $\frac{1}{4}$ dari total nilai bantuan pertahun, baik bantuan tetap maupun bantuan komponen.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kegiatan PKH merupakan tahapan pelaksanaan PKH yang meliputi berbagai kegiatan yang dilakukan oleh seluruh komponen PKH dari awal ditetapkan suatu lokasi PKH sampai dengan berakhirnya program PKH yaitu sebagai berikut:

- a. Koordinasi dan sosialisasi
- b. Rekrutmen dan pelatihan
- c. Rapat koordinasi tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota
- d. Bimbingan teknis pendamping dan opertor serta penyedia layanan
- e. Pengaduan masyarakat
- f. Monitoring dn evaluasi
- g. Pertemuan peningkatan kemampun keluarga

Pendamping PKH

Pendamping PKH adalah warga negara indonesia yang memenuhi kualifikasi tertentu dan lulus tes seleksi serta di tetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial, Ditjen Perlindungan Dan Jaminan Sosial, Kemntrian Sosial RI untuk melakukan pendampingan kepada peserta PKH berdasarkan kontrak kerja dalam kurun waktu tertentu.

Secara kelembagaan, pendamping melaporkan seluruh kegiatan dan permasalahannya ke UPPKH Kabupeten/Kota. Pendamping memiliki tugas yang sangat penting dalam pelaksanaan program dilapangan, yaitu: pendamping menghabiskan sebagian besar waktunya dengan melakukukan kegiatan dilapangan, yaitu mengadakan pertemuan dengan ketua kelompok,

berkunjung dan berdiskusi dengan petugas pemberi pelayanan kesehatan, pendidikan, pemuka daerah maupun dengan peserta itu sendiri.

Adapun tugas pendamping PKH sebagai berikut:

Tugas pokok pendamping PKH meliputi:

Tugas persiapan program,

Menyelenggarakan pertemuan awal,

Tindak lanjut pertemuan awal,

Tindak lanjut setelah peserta PKH ditetapkan oleh Kementerian Sosial.

Tugas rutin pendamping PKH antara lain:

a. Melakukan pemukhtahiran data,

b. Melakukan kegiatan verifikasi pelaksanaan kewajiban peserta PKH,

c. Kunjungan insidental khususnya kepada peserta PKH yang tidak memenuhi komitmen,

d. Memfasilitasi dan menyelesaikan kasus pengaduan dengan cara menerima, mencatat, menyelesaikan maupun memfasilitasi keningkat yang lebih tinggi untuk mendapatkan solusi,

e. Melakukan koordinasi dengan penyedia layanan kesehatan dan pendidikan yang dilakukan minimal satu bulan sekali di unit pelayanan,

f. Melakukan pertemuan kelompok bulanan dengan seluruh anggota peserta PKH

Tugas pencatatan dan pelaporan

a. Tugas pencatatan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setiap aspek kegiatan dalam PKH perlu dicatat, dilaporkan dan ditindak lanjuti agar proses pengadilan, keberlangsungan pengembangan program dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan sasarannya.

Tugas pelaporan

Rencana dan realisasi kegiatan pendamping PKH wajib dilaporkan kepada UPPKH Kabupaten/Kota secara rutin setiap bulan dengan menggunakan formasi laporan yang telah ditentukan.

Tugas pendamping PKH pada penyaluran bantuan

- a. Menyerahkan kartu kepesertaan PKH kepada ibu pengurus/penerima manfaat yang di dampinginya
- b. Mengingatkan peserta PKH bahwa kartu PKH merupakan alat untuk menerima dana bantuan sehingga wajib dibawa saat penyaluran bantuan berlangsung
- c. Berkoordinasi dengan petugas bayar terkait jadwal dan lokasi penyaluran bantuan serta memeriksa data rencana pembayaran peserta PKH yang di dampinginya.
- d. Mengingatkan kepada ketua kelompok mengenai jadwal penyaluran bantuan
- e. Menyiapkan daftar hadir/presentasi dan buku control penyaluran bantuan

2.11 Pandangan Islam Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program

PKH

Islam memandang masyarakat sebagai sebuah sistem yang individu-individunya saling membutuhkan dan saling mendukung. Antar individu masyarakat mempunyai hubungan yang idealnya saling menguntungkan. Kesenjangan dalam hal pendapatan ekonomi merupakan sebuah potensi yang dapat dimanfaatkan guna memupuk kerukunan dan silaturahmi antar sesama. Islam mendorong pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dengan berpegang pada 3 prinsip utama; ketiga prinsip itu adalah *Prinsip ukhuwwah*, *Prinsip ta'awun*, dan *prinsip persamaan derajat*, prinsip-prinsip tersebut akan dijelaskan di bawah ini.

Pertama, prinsip *ukhuwwah*. *Ukhuwwah* dalam bahasa arab berarti persaudaraan. Prinsip ini menegaskan bahwa tiap-tiap muslim saling bersaudara, walaupun tidak ada pertalian darah antar mereka. Rasa persaudaraan menjamin adanya rasa empati dan merekatkan silaturahmi dalam masyarakat. Prinsip ini berdasarkan pada firman Allah SWT (al- hujurat {49:19)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.” (QS. Al-Hujurat [49]:10)

Rasulullah mengumpamakan umat islam sebagai sebuah bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Di hadis lain beliau berpesan bahwa umat islam hendaknya bersikap saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi

terhadap sesama layaknya sebuah tubuh, dimana jika ada satu bagian yang merasa sakit, maka anggota tubuh yang lain akan susah tidur dan merasakan demam.

Dalam konteks pemberdayaan, ukhuwwah merupakan motif yang mendasari seluruh upaya pemberdayaan masyarakat. Rasulullah memiliki visi masyarakat muslim yang saling menolong dan saling menanggung kesulitan secara bersama. Islam mendorong pemeluknya untuk meringankan beban saudaranya yang dilanda kesulitan melalui sabda Rasulullah SAW “Barang siapa yang melapangkan kesusuahan di hari duni dari seseorang mukmin, maka Allah melapngkan dirinya satu kesusuahan di hari kiamat.” Islam merupakan agama yang menanamkan kepedulian dalam diri pemeluknya.

Kedua, prinsip *ta'awun*. Allah mendorong manusia untuk saling tolong menolong sesamanya. Allah SWT berfirman:(Al-maidah {5}:2)

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Al-maidah {5}:2)

Prinsip *ta'awun*, atau tolong menolong ini merupakan prinsip yang utama dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Karena sesungguhnya program pemberdayaan itu adalah sebuah upaya menolong individu dan masyarakat yang membutuhkan bantuan dan bimbingan. Upaya pemberdayaan harus dimulai dari rasa kepedulian dan niat menolong individu dan masyarakat

yang membutuhkan. Hal ini berasal dari rasa persaudaraan yang tumbuh dari ikatan *ukhuwwah*.

Prinsip *ta'awun*, atau tolong menolong ini juga dapat diartikan sebagai sebuah sinergi anatar berbagai pihak yang berkepentingan demi terwujudnya pemberdayaan yang optimal. Pemberdayaan masyarakat adalah proses kolaborasi, maka hendaknya seluruh pihak saling membantu demi terwujudnya tujuan bersama. Pemberdayaan bukanlah tanggung jawab pihak tertentu saja, melainkan tanggung jawab seluruh pihak terkait. Pemerintah tidak akan mampu menyelesaikan masalah sendiri tanpa besinergi dengan pihak lain. Dengan *ta'awun*, pemerintah, lembaga zakat, para ulama, organisasi islam dan berbagai LSM dapat bahu-membahu memadukan kekuatan inansial, manajemen, sumber daya manusia, metodeologi, dan penentuan kebijakan sehingga tercipta sinergi yang efektif dalam melaksanakan pemberdayaan dan mengentaskan kemiskinan.

Ketiga, prinsip persamaan derajat anatar umat manusia. Islam telah memproklamirkan persamaan derajat anatar umat manusia sejak 14 abad yang lalu. Allah SWT berfirman :(Al-hujurat {49};13)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: *Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (Al-hujurat {49};13).*

Ayat diatas menegaskan persamaan derajat antar umat manusia, dan bahwa kemuliaan yang ada di sisi Allah hanyalah berdasarkan iman dan takwa. Ayat diatas juga menekankan bahwa pada dasarnya perbedaan harta dan kekayaan tidak menjadi sumber perpecahan, akan tetapi menjadi wasilah untuk tolong menolong dan saling membantu. Allah SWT Berfirman dalam ayat lain (Az-zukruf [43]32)

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا تَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang kamu kumpulkan. (Az-zukruf [43]32)

Menurut banyak ahli tafsir (Athiyyah, 1984:25.201), kata *sukhriyya* dalam ayat ini mengandung arti memanfaatkan dan memperkerjakan. Ayat ini mengandung arti bahwa manusia dilebihkan sebagian atas yang lain dalam rangka pemenuhan kebutuhan umat manusia secara umum, dan bukan untuk berbangga-bangga dan saling merendahkan. Ayat ini mengarahkan manusia untuk saling membantu, karena manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Tidak ada yng mampu memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, ayat ini

merupakan dorongan bagi semua pihak untuk terus bersama memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

1.2 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis memaparkan 3 penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Simpang Kota Medan, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Elga Jatu Nataya pada program S1 di Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Tahun 2018 yang judul skripsi: “Pemberdayaan Keluarga Penerima Manfaat Melalui Program Keluarga Harapan Di Kelurahan Kelun Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun”

Penelitian ini melihat bagaimana partisipasi KPM dalam menjalankan program pemberdayaan, motivasi, kemitraan, proses yang ada di dalamnya dan perubahan pola pikir, sikap, dan perilaku.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Arif Citra Permana pada program S1 di Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang pada Tahun 2017 yang judul skripsi: “ Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Program Keluarga Harapan Untuk Memutus Rantai Kemiskinan Di Kota Malang”

Penelitian ini melihat bagaimana pemahaman masyarakat mengenai implementasi pemberdayaan ini, dan faktor pendukung dan penghambat serta dampak yang diberikan dalam pelaksanaan pemberdayaan dalam memutus rantai kemiskinan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Mety Andriyani pada program S1 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah pada Tahun 2017 yang judul skripsi: “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Bojongsari Depok Jawa Barat”

Penelitian ini melihat bagaimana Proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui PKH.

1.3 Defenisi Konsep

Defenisi konsep adalah istilah dan defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok, atau individu yang menjadi pusat perhatian dalam ilmu sosial (Singarimbun 2006:33).

Adapun batasan defenisi konsep tersebut adalah:

- a. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan. (Sumaryadi (2005:11)
- b. PKH adalah program pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan kewajibannya.(Permensos No. 1 Tahun 2018)

2.14 Kerangka Pemikiran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Permensos No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan

Pemberdayaan masyarakat miskin melalui program PKH di Desa
Simpang Kota Medan Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu

Faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat miskin
melalui program PKH di Desa Simpang Kota Medan Kecamatan
Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu

2.15 Variabel/ Indikator Penelitian

Sugiyono (2014:38) menyatakan bahwa variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Tabel 2.2 Area perubahan dan hasil yang diharapkan

Variabel	Indikator	Sub indikator
Pelaksanaan Program Keluarga Harapan	efektivitas program keluarga harapan (PKH)	Efektif tidaknya suatu program yang dibentuk oleh pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat.
	Pemerataan atau kesamaan terhadap	Pemerataan berhubungan dengan keadilan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PKH	didapat oleh masyarakat sasaran dalam mendapat bantuan PKH yang dikelola oleh Kementrian Dinas Sosial, dan pemerataan juga menyangkut kepada tersosialisasikannya PKH kepada semua pihak yang terkait serta lancarnya penguliran bantuan PKH kepada masyarakat lain.
Ketepatan Program Keluarga Harapan	Ketepatan PKH yang benar-benar berguna dan bernilai serta tercapainya tujuan PKH yang telah ditetapkan.

Sumber: *Permensos No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan*

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penulisan Skripsi ini peneliti melakukan penelitian dilaksanakan di Desa Simpang Kota Medan Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu. Pada kurun waktu Feruari 2021 sampai Juli 2021.

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Jenis

Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian dengan cara mendeskripsikan secara langsung fenomena yang terjadi pada objek penelitian.

3.2.2 Sumber Data

Dalam setiap penelitian untuk dapat mendukung proses dan hasil penelitian tersebut, maka dibutuhkan data-data yang pasti dan nyata dari objek penelitian. Dalam hal ini sumber data yang dipakai adalah:

- a. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari objeknya. Yang mana data primer disini diperoleh melalui pengamatan langsung di lapangan, hasil wawancara dan menyebarkan angket kuesioner.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang didapat dari instansi yang bersangkutan. Yang mana data sekunder disini diperoleh melalui catatan yang dimiliki oleh

institusi seperti, media internet, serta berbagai literatur-literatur dan tinjauan pustaka yang relevan dan mendukung penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknis pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah:

a. Observasi

Menurut Sugiyono (2009:166) observasi adalah pengamatan dan pencatatan terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi yang dilakukan adalah obeservasi langsung. Umtuk melihat bagaimana pelaksanaan Pemberdayaan masyarakat miskin melalui program PKH di desa simpang kota medan kecamatan kelayang kabupaten indragiri hulu.

b. Wawancara

Menurut Sugiyono (2009:72), wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide malalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Penulis melakukan wawancara tanya jawab langsung kepada Pendamping PKH, dan Masyarakat Penerima Manfaat Program PKH yang dijadikan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara terstruktur terhadap narasumber (*key informan*) yaitu menggunakan panduan berupa pertanyaan yang akan dilontarkan kepada informan terkait dengan judul penelitian. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Hp, buku dan pena.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data melalui buku-buku ataupun literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dokumentasi dalam penelitian ini diperoleh dari Pendamping PKH Desa Simpang Kota Medan ataupun buku-buku, serta literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

4. Informan Penelitian

Subjek penelitian atau responden adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Sebagaimana dijelaskan oleh Arikunto (2004:145) subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Jadi, subjek penelitian itu merupakan sumber informasi yang digali untuk mengungkap fakta-fakta dilapangan. Berdasarkan penjelsan tersebut, maka penentuan subjek penelitian digunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan secara jelas dan mendalam. Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan unit analisis individu dan organisasi sebagai satuan yang diperhitungkan dalam subjek penelitian.

Selanjutnya, penentuan subjek penelitian atau responden yang dianggap sebagai kay informan dilakukan dengan cara *purposive sampling*. Seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2010: 85) bahwa, teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampeldengan sengaja dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. Sehingga akan memudahkan penelitian dalam menelusuri situasi yang diteliti.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Informan dalam penelitian kualitatif yaitu informan penelitian yang memahami informasi tentang objek penelitian. Informasi yang dipilih harus memiliki kriteria agar informasi yang didapatkan bermanfaat untuk penelitian yang dilakukan.

Adapun informan dalam penelitian ini meliputi:

Tabel 3.1 Key Informan Penelitian

No	Subjek Penelitian	Jumlah Informan
1	Kepala Desa Simpang Kota Medan	1
2	Kaur Desa Simpang Kota Medan	1
3	Kepala Dusun	2
4	Pendamping PKH	1
5	Masyarakat Penerima Bantuan PKH	4
6	Masyarakat yang tergolong miskin tidak menerima PKH	2
Jumlah		11 informan

Sumber: Data Olahan Tahun 2021

3.5 Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan penelitian ini, yang menjadi sasaran populasi adalah masyarakat yang mendapatkan manfaat dari program PKH di Desa Simpang Kota Medan yaitu sebanyak 75 KPM.

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2008:109) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dapat ditarik kesimpulan bahwa sampel adalah sebagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi karena memiliki karakteristik yang sama.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *Purposive proportional random sampling*, yakni sampel yang diambil dengan berdasarkan pertimbangan subyektif peneliti, dimana persyaratan yang dibuat sebagai kriteria harus dipenuhi sebagai sampel. Jadi dasar pertimbangannya ditentukan sendiri oleh peneliti dan sampel yang diambil secara Purposive ini peneliti harus mempunyai pengetahuan yang cukup tentang populasinya, tepat alam menentukan persyaratan dan menguasai benar-benar materi penelitian dengan permasalahannya.

Porposive sampling menurut Sugiyono adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012:68). Adapun langkah-langkah untuk mengambil subjek yang menjadi sampel ini dilakukan dengan cara:

1. Menentukan Desa yang akan dijadikan tempat penelitian dengan pertimbangan lokasi Sasaran Penerima Dana PKH yaitu Desa

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Simpang Kota Medan, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu.

2. Menentukan subjek yang akan dijadikan responden dalam penelitian ini adalah keluarga tidak mampu sebanyak 43 RTSM yang menerima dana PKH tersebar di lima kedusunan di Desa Simpang Kota Medan Kecamatan Kelayang.

6 Teknik Analisa Data

Untuk mengetahui pelaksanaan pemberdayaan masyarakat miskin melalui program keluarga harapan di Desa Simpang Kota Medan Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu penulis menggunakan metode yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan hasil pengamatan dan wawancara yang diperoleh terkumpul, data tersebut kemudian dikelompokkan menurut jenisnya dan ditambahkan dengan keterangan-keterangan yang sifatnya mendukung dalam menjelaskan hasil penelitian. Sehingga dapat diketahui gambaran tentang bagaimana pelaksanaan pemberdayaan masyarakat miskin melalui program keluarga harapan di Desa Simpang Kota Medan Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4. Identifikasi Desa Simpang Kota Medan

4.1.1 Sejarah Berdirinya Desa Simpang Kota Medan

Asal muasal terjadinya Desa Simpang Kota Medan mulanya belum dinamakan, hanya masih disebut oleh warga masyarakat pada waktu itu, yaitu Polak Pisang sekitar tahun 1915 pada zaman Kolonial Belanda.

Pada zaman itu Desa Simpang Kota Medan masih dinamakan Polak Pisang, artinya kampung yang banyak perkebunan pisang. Dengan beriringan waktu nama desa diganti dengan nama Desa Simpang Kota Medan karena digabungkan nya beberapa desa menjadi satu dan dinamailah dengan Simpang Kota Medan, Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu.

Visi Desa Simpang Kota Medan “Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang Bermartabat dan Religius dengan Mengembangkan Potensi Sumber Daya Yang Ada dengan Sebaik Mungkin”.

Misi Desa Simpang Kota Medan adalah:

1. Mengembangkan dan meningkatkan hasil pertanian masyarakat
2. Pembuatan sarana jalan usaha tani dan peningkatan jalan lingkungan
3. Meningkatkan sarana air bersih bagi masyarakat
4. Perbaikan dan peningkatan layanan kesehatan dan umum
5. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan
6. Meningkatkan keterampilan dan kualitas SDM

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Pengadaan permodalan untuk usaha kecil, memperluas lapangan kerja dan manajemen masyarakat

8. Meningkatkan kapasitas aparat desa dan BPD

9. Meningkatkan sarana dan prasarana kerja aparat desa dan BPD

Desa Simpang Kota Medan berdiri pada tahun 1915 yang berada dalam lingkup Kecamatan Kelayang dengan luas wilayah 4.200,00 Ha dengan jumlah penduduk 1.711 jiwa. Desa Simpang Kota Medan terletak di Kecamatan Kelayang dengan batas-batas Desa sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan kabupaten pelalawan
2. Sebelah selatan berbatasan dengan desa Kota Medan dan Sungai Golang
3. Sebelah timur berbatasan dengan kec. Lubuk Batu Jaya dan desa Simpang Selanjut
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kec. Peranap dan desa Tanjung Beludu

4.1.2 Keadaan Penduduk

Pertumbuhan merupakan salah satu faktor penting dalam masalah sosial ekonomi umumnya, dan masalah penduduk khususnya. Pertumbuhan penduduk juga merupakan proses keseimbangan yang dinamis antara komponen kependudukan yang dapat menambah dan mengurangi jumlah penduduk yang meliputi komponen seperti kelahiran, kematian, migrasi masuk, migrasi keluar.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian penduduk adalah investasi yang sangat menentukan terhadap kemajuan pembangunan. Untuk itu tingkat perkembangan sangat penting diketahui dalam menentukan langkah-langkah pembangunan. Berdasarkan data 2020, jumlah penduduk Desa Simpang Kota Medan sampai saat ini 1.711 jiwa. Untuk mengetahui kondisi penduduk Desa Simpang Kota Medan dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk dan Rumah Tangga Berdasarkan Klasifikasi Kesejahteraan

Jumlah penduduk			Jumlah rumah tangga berdasarkan tingkat kesejahteraan			
Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Kaya	menengah	miskin	Jumlah
860	851	1.711	80	90	170	340

Sumber : Kantor Desa Simpang Kota Medan 2020

Dari tabel diatas dapat terlihat jumlah penduduk Desa Simpang Kota Medan adalah 1.711 jiwa. Jumlah laki-laki 860 jiwa dan perempuan berjumlah 851 jiwa. Perbandingan jumlah penduduk antara laki-laki dan perempuan tidak jauh berbeda.

4.1.3 Keadaan Pendidikan dan Sosial Agama

Pendidikan merupakan tolak ukur majunya suatu masyarakat. Artinya semakin tinggi rata-rata tingkat pendidikan suatu masyarakat semakin tinggi pula kemajuan yang terdapat di Desa Simpang Kota

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Medan begitu juga dengan sebaliknya, semakin rendah tingkat pendidikan suatu masyarakat maka semakin rendah tingkat pendidikan suatu masyarakat maka semakin rendah pula kemajuan yang terdapat di Desa Simpang Kota Medan

Bila dilihat dari segi pendidikan penduduk di Desa Simpang Kota Medan mengalami peningkatan dari tahun ketahun, hal ini dapat dilihat dari banyaknya orang tua yang menyekolahkan anaknya kejenjang yang lebih tinggi. Tingkat pendidikan Desa Simpang Kota Medan dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 4.2 Jumlah Tingkat Pendidikan Akhir

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Paud	50 Orang
2	TK	50 Orang
3	SD/Sederajat	543 Orang
4	SLTP/Sederajat	460 Orang
5	SLTA/Sederajat	200 Orang
6	Akademi	50 Orang
7	S. 1	100 Orang
Jumlah		1.453 Orang

Sumber : Kantor Desa Simpang Kota Medan 2020

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa tingkat pendidikan masyarakat di Desa Simpang Kota Medan masih dalam catatan minimum. Hal ini diketahui jika jumlah diatas dibandingkan dengan jumlah penduduk secara keseluruhan.

Mengenai sarana dan prasarana pendidikan belum begitu memadai, namun banyak masyarakat tidak lemah keinginan untuk tetap melanjutkan pendidikan anaknya kejenjang yang lebih tinggi, meskipun mereka harus keluar daerah.

Disamping mengikuti pendidikan secara normal dibangku sekolah, masyarakat desa pelangko juga menyelenggarakan pendidikan yang bersifat nonformal, seperti majelis ta'lim, pengajian remaja mesjid, pengajian anak-anak dalam membina mental dan bakat bagi generasi dalam masyarakat. Berikut dapat dilihat tabel sarana pendidikan formal dan non formal:

Tabel 4.3 Sarana Pendidikan Formal

No	Jenis pendidikan	jumlah	Gedung	Jumlah guru
1	Paud	2	2 Lokal	8 Orang
2	TK	2	2 Lokal	10 Orang
3	MDA	3	3 Lokal	9 Orang
4	SD	2	12 Lokal	20 Orang
Jumlah		9	19 Lokal	47 Orang

Sumber : Kantor Desa Simpang Kota Medan 2020

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sarana pendidikan formal yang ada di Desa Simpang Kota Medan hanya ada sampai tingkat SD, sedangkan untuk pendidikan SLTP dan SLTA warga masyarakat melanjutkan ke Kecamatan Kelayang.

Selain itu sarana pendidikan juga menjadi salah satu faktor yang menunjang lancarnya proses belajar mengajar hal ini untuk menghindari masyarakat dari buta aksara dan angka.

Tabel 4.4 Pendidikan Non-Formal

No	Jenis Kegiatan	Jumlah
1	Majelis Ta'lim	4 Kelompok
2	Pengajian Remaja Masjid	3 Kelompok
3	Pengajian Anak-anak	6 Kelompok
Jumlah		13 Kelompok

Sumber : Kantor Desa Simpang Kota Medan 2020

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa di Desa Simpang Kota Medan terdapt sarana pendidikan non-formal, sehingga pembinaan mental dan bakat masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik.

Agama juga merupakan satu-satunya sumber nilai, baik itu nilai moralmaupun spiritual yang memiliki peranan penting dan sumbangan yang cukup besar dan paling tinggi harganya bagi setiap jenjang kehidupan masyarakat. Masyarakat di Desa Simpang Kota Medan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mayoritas beragama islam. Adapun sarana ibadah yang ada di Desa Simpang Kota Medan dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 4.5 Sarana Ibadah di Desa Simpang Kota Medan

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	2
2	Mushola	4
Jumlah		6

Sumber : Kantor Desa Simpang Kota Medan 2020

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa Sarana Tempat Ibadah di Desa Simpang Kota Medan cukup memadai, dengan demikian kegiatan agama dapat dilaksanakan dengan lancar. Seperti Masjid dan Mushola selain digunakan untuk tempat ibadah dapat juga digunakan sebagai tempat pengajian ibu-ibu, pengajian remaja masjid, dan juga pengajian anak-anak.

4.1.4 Mata Pencarian Penduduk

Berdasarkan hasil survey penelitian dilapangan, dapat diketahui bahwa tingkat perekonomian masyarakat Desa Simpang Kota Medan ada golongan atas, menengah, dan golongan bawah. Kebanyakan dari masyarakat bekerja sebagai petani, pedagang, jasa dan lain sebagainya.

Untuk lebih jelas dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 4.6 Jenis Pencarian Masyarakat Desa Simpang Kota Medan

No	Jenis pekerjaan	Jumlah
1	Petani	447
2	PNS	11
3	Pedagang barang klontong	3
4	Perawat swasta	3
5	TNI	1
6	Polri	1
7	Pengusahakecil, menengah dan besar	2
8	Guru swasta	16
9	Karyawan perusahaan swasta	7
10	Karyawan perusahaan pemerintah	1
11	Wiraswasta	53
12	Tidak mempunyai pekerjaan tetap	88
13	Belum bekerja	228
14	Purnawirawan/pensiunan	2
Jumlah		873

Sumber : Kantor Desa Simpang Kota Medan 2020

Data diatas menunjukkan bahwa umumnya masyarakat Desa Simpang Kota Medan dalam memenuhi kehidupannya terdiri dari berbagai profesi. Namun pada kenyataannya masyarakat Desa Simpang Kota Medan banyak berprofesi sebagai petani dengan jumlah 448 orang.

4.1.5 Adat Istiadat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masyarakat Desa Simpang Kota Medan menganut sistem sosial dengan menggunakan sistem adat istiadat yang mengatur tata cara pergaulan sosial masyarakat desa. Corak adat istiadat yang nampak dalam hal perkawinan adalah adat perkawinan melayu, bahkan dalam perkawinan melayu adat istiadat masyarakat setempat kelihatan jelas digunakan, mulai dari kegiatan meminang sampai dengan upacara perkawinan, dalam upacara perkawinan masyarakat Simpang Kota Medan selalu khatam Al-Quran, semua dilakukan melalui proses adat istiadat. Setiap adanya upacara dikalangan masyarakat Simpang Kota Medan selalu dilandasi dengan berkumpul, musyawarah, mufakat, dan gotong royong.

Selain itu ada juga selamatan, syukuran atau kenduri, yang dilakukan oleh masyarakat Simpang Kota Medan dalam waktu tertentu, seperti turun mandi, keselamatan atas lahiran, dan juga jika ada yang meninggal dunia. Syukuran akan dilakukan mula dari malam pertama sampai malam ketujuh mereka mengadakan bacaan yasinan di rumah tersebut. Di desa Simpang Kota Medan adat ini sudah menjadi kebiasaan.

4.2 Deskripsi Unit Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (UPPKH)

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia adalah kemiskinan. Kemiskinan menjadi salah satu cerminan pembangunan negara, apakah pembangunan tersebut dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat atau hanya

segelintir orang saja. Dilihat dari sisi *poverty profile* atau bentuk-bentuk persoalan kemiskinan masyarakat, menurut Tjokrowinto kemiskinan tidak hanya menyangkut persoalan kesejahteraan (welfare) semata, tetapi kemiskinan juga menyangkut persoalan kerentanan, ketidak berdayaan, terputusnya akses terhadap pasar, dan kemiskinan terefleksi dalam budaya kemiskinan yang diwarisi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Untuk mengatasi kemiskinan yang ada, pemerintah membuat sebuah penanggulangan kemiskinan agar kemiskinan yang ada di Indonesia dapat menurun.

Penanggulangan kemiskinan dalam Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan menyebutkan bahwa penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus pengembangan kebijakan di bidang perlindungan sosial, pemerintah Indonesia menyelenggarakan Program Keluarga Harapan (PKH), program ini lebih dimaksudkan kepada upaya membangun sistem perlindungan masyarakat miskin. Program Keluarga Harapan ini mulai diberlakukan di Desa Simpang Kota Medan pada Tahun 2014.

Alur pelaksanaan PKH dimulai dari pengumpulan data para target program, melakukan sosialisasi seperti pertemuan awal dengan para penerima

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- manfaat dan melakukan validasi, selanjutnya pemenuhan syarat-syarat untuk menjadi penerima manfaat, setelah memenuhi semua syarat dan sudah menjadi penerima manfaat selanjutnya para penerima manfaat mendapatkan penyaluran dana PKH dan berupa pendampingan yang dilakukan oleh para pendamping berupa pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga/*family Development Sesion* (FDS) dan mendapat layanan serta verifikasi yang dilakukan oleh fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan, setelah mendapatkan layanan para penerima manfaat harus memiliki komitmen yang sudah ada untuk para penerima manfaat dan akan mendapatkan sanksi jika para penerima manfaat melanggar ketentuan yang sudah ada, dan yang terakhir pemukhtahiran data apakah ada perubahan data melalui laporan penerima manfaat.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Penutup

Dari hasil Penelitian yang Penulis lakukan mengenai Analisis Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui PKH Di Desa Simpang Kota Medan Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu, maka Peneliti dapat menarik kesimpulan dilihat dari tujuan PKH dalam memberdayakan masyarakat miskin di Desa Simpang Kota Medan Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu dikatakan cukup baik. Program Keluarga Harapan (PKH) ini sangat membantu sekali dalam Perekonomian, Pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Dengan terbantunya Perekonomian masyarakat maka kemiskinan yang menjadi Permasalahan akan secara bertahap bisa teratasi.

Tetapi masih banyak terdapat kendala Hambatan- hambatan atau kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan Pemerdayaan Masyarakat Miskin Melalui PKH Di Desa Simpang Kota Medan, yaitu sebagai berikut:

1. Kurangnya pendekatan dan komunikasi antara pendamping dengan aparat desa
2. Terbatasnya keputusan untuk memilih peserta PKH karena yang memilih dari pusat.
3. Masih kurangnya pelatihan yang diberikan kepada kpm untuk meningkatkan keterampilan

4. Masih kurangnya pemahaman KPM mengenai tujuan dari Program Keluarga Harapan

5. Masih banyaknya salah sasaran dalam penerima PKH karena ketidak telitian Pendamping Dan Aparat Desa dalam mendata masyarakat miskin.

Saran

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai Pemerdayaan Masyarakat Miskin Melalui PKH Di Desa Simpang Kota Medan Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu, maka peneliti dapat memberikan saran kepada pendamping dan KPM sebagai bentuk masukan penulis agar kedepannya dalam pelaksanaan Pemerdayaan Masyarakat Miskin Melalui PKH Di Desa Simpang Kota Medan Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu lebih baik lagi kedepannya.

1. Perlunya komunikasi yang baik antara Pendamping Dan Aparat Desa dalam pelaksanaan program PKH ini.
2. Perlunya dilakukan pelatihan khusus untuk menambahkan keterampilan KPM
3. Perlunya pendekatan yang baik anantara Pendamping Dengan KPM agar pendamping lebih leluasa untuk memotoring KPM
4. Pendamping Dan Aparat Desa harus lebih teliti dalam mendata calon penerima PKH karena masih banyak masyarakat yang tergolong miskin tetapi tidak terdaftar sebagai penerima PKH.



DAFTAR PUSTAKA

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Arwas, Oos M. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*. Bandung: Alfabeta
- Buku Panduan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2019
- Hamid, Hendrawati. 2018. *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. Makasar: Dela Macca
- Harat. 2018. *Kebijakan Publik*. Malang: Setara Press
- Masram, Mu'ah. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jawa Barat: Zifatama Publisher
- Mulyadi. 2014. *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Persepektif Pembangunan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Rasimin. 2018. *Metedologi Penelitian*. Yogyakarta: Mitra Cendikia
- Siagian, Sondong P. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Alfabeta
- Soetomo. 2011. *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Ugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&B*. Bandung : Alfabeta
- Arif Cira Permana, 2018, *Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Program Keluarga Harapan Untuk Memutus Rantai Kemiskinan Di Kota Malang* (studi kasus pemahaman masyarakat mengenai implementasi pemberdayaan ini, dan faktor pendukung dan penghambat serta dampak yang diberikan dalam pelaksanaan pemberdayaan dalam memutus rantai kemiskinan). Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan.
- Elga Jati Nataya, 2017, *Pemberdayaan Keluarga Penerima Manfaat Melalui Program Keluarga Harapan Di Kelurahan Kelun Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun Tahun 2017-2018* (Studi Kasus Partisipasi Kpm Dalam Menjalankan Program Pemberdayaan, Motivasi, Kemitraan, Proses Yang Ada Didalamnya Dan Perubahan Pola Pikir, Sikap Dan Perilaku) Jurnal Sosiologi Dilema.



Evi Rahmawati, Peran Pendamping Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miakin Melalui Program Keluarga Harapan, vol 1(2): 161-169, Desember 2017, ISSN: 2549-1539

Program Pemberdayaan, Motivasi, Kemitraan, Proses Yang Ada Didalamnya Dan Perubahan Pola Pikir, Sikap Dan Perilaku) Jurnal Sosiologi Dilema.

Program Pemberdayaan, Motivasi, Kemitraan, Proses Yang Ada Didalamnya Dan Perubahan Pola Pikir, Sikap Dan Perilaku) Jurnal Sosiologi Dilema.

Widjajanti, Model Pemberdayaan Masyarakat, vol 12 (1): 15-27. April 2011

Meti Andriyani, 2020, *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Bojongsari Depok Jawa Barat* (studi kasus melihat bagaimana proses pemberdayaan masyarakat melalui PKH). Jurnal Politik dan Sosial

Ulfi utra Sany, Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Al Qur'an, vol 39(1): 32-44, April 201

INTERNET

<https://databoks.katadata.co.id/program-keluarga-harapan>

<https://www.kominfo.go.id/program-keluarga-harapan>

<https://media.neliti.com/media/publications/9264-ID-tingkat-keberdayaan-masyarakat-dalam-program-pemberdayaan-masyarakat-di-kota-ban.pdf>

<https://www.pelajaran.co.id/2018/09/pengertian-pemberdayaan-masyarakat->

[tujuan-prinsip-strategi-dan-tahapannya-menurut-para-ahli.html](https://www.pelajaran.co.id/2018/09/pengertian-pemberdayaan-masyarakat-tujuan-prinsip-strategi-dan-tahapannya-menurut-para-ahli.html)

<http://rectorics.blogspot.com/2015/02/pengertian-kebijakan-publik-public.html>

<https://www.jogloabang.com/sosial/permensos-1-2018-program-keluarga-harapan>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI



Bapak Baharuddin, Kepala Desa Simpang Kota Medan



Bapak Arpan Seksi Kesejahteraan



Bapak Syamsul Bahri ,Kepala Dusun V dan

Bapak Muhammad Daud , Kepala DusunVI



Ibu Suci Anggraini S.Ikom, Pendamping Pkh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR WANCARA INFORMAN

Aparatur Desa

Bagaimana menurut bapak/ibu tentang adanya program keluarga harapan dalam membantu pemberdayaa/perekonomian masyarakat?

Apakah program keluarga harapan di desa simpang kota medan sudah di salurkan ke semua masyarakat yang tergolong miskin?

Apakah sudah ada masyarakat penerima manfaat PKH di desa simpang kota medan yang kualitas kehidupannya meningkat?

4. Dalam menjalankan program keluarga harapan ini, apakah terdapat hambatan-hambatan dalam menjalankan program ini?

5. Apakah ada pelatihan khusus yang diajarkan kepada masyarakat penerima manfaat pkh untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat?

Apakah dengan adanya PKH kualitas Kesehatan anak, ibu hamil,lansia dan Pendidikan anak-anak KPM terbantu dan meningkat?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR WANCARA INFORMAN

Masyarakat Penerima PKH

Apakah manfaat yang dirasakan setelah adanya program keluarga harapan ini?

Apakah ada peningkatan kualitas hidup/perekonomian setelah adanya PKH?

Apakah ada pelatihan khusus yang diberikan untuk meningkatkan kemandirian dalam memenuhi kebutuhan hidup?

4. Apakah ada hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelayanan Program Keluarga Harapan?

5. Apakah dengan adanya PKH Kesehatan Dan Pendidikan anak-anak meningkat dan terbantu?

Masyarakat yang tergolong miskin dan tidak menerima PKH

Menurut ibu apakah yang menyebabkan ibu tidak terdaftar sebagai Penerima PKH?

Apakah harapan ibu kedepannya untuk Aparat Desa Dan Pendamping PKH dalam mendata masyarakat yang akan menerima bantuan?

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/1879/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Izin Riset**

Pekanbaru, 17 Maret 2021 M
3 Sya'ban 1442 H

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

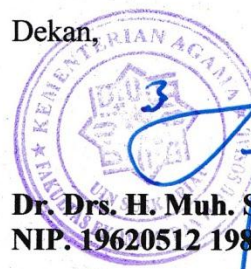
Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Nurisma
NIM. : 11770523353
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan **Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
"Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Simpang Kota Medan Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu" Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Raya Lintas Timur Km. 05 Pematang Reba Telp. (0769) 341609, Fax. (0769) 341211
Email. info@dpmpstsp.inhukab.go.id Website. dpmpstsp.inhukab.go.id

RENGAT

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 57/DPMPTSP/NON IZIN-SKP/III/2021

- MEMBACA** : Permohonan Surat Keterangan Penelitian (SKP) Nomor tanggal 22 Maret 2021 perihal permohonan Surat Keterangan Penelitian;
- MENIMBANG** : Surat Rekomendasi Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi Nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/39784 tanggal 18 Maret 2021
- MENGINGAT** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
2. Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor Kpts. 24/II/2020 Tanggal 14 Januari 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hulu;

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hulu memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

1. Nama : **NURISMA**
2. Nomor Induk Mahasiswa : **11770523353**
3. Alamat : **DUSUN 5 RT/RW 013/006 SIMPANG KOTA MEDAN DESA SIMPANG KOTA MEDAN KEC. KELAYANG - KAB. INDRAGIRI HULU**
4. Kebangsaan : **INDONESIA**

Melakukan penelitian dalam rangka penyusunan karya ilmiah (Disertasi / tesis / skripsi / tugas akhir) dengan rincian sebagai berikut :

1. Judul Penelitian : **ANALISIS PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN MELALUI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA SIMPANG KOTA MEDAN KEC. KELAYANG KAB. INDRAGIRI HULU**
2. Lokasi Penelitian : **KANTOR KEPALA DESA SIMPANG KOTA MEDAN KEC. KELAYANG KAB. INDRAGIRI HULU**
3. Lama Penelitian : **6 (ENAM) BULAN**
4. Status Peneliti : **MAHASISWA**
5. Nama Lembaga : **UIN SUSKA RIAU**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dalam ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
2. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada pejabat setempat/lembaga swasta yang akan dijadikan objek lokasi penelitian.
3. Melaksanakan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintah.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Rengat
Pada tanggal : 22 Maret 2021

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,
AHMAD FAHMI, S.Sos
Pembina (IV/a)
NIP. 19720311 199303 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Indragiri Hulu;
2. UIN SUSKA RIAU;
3. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
KECAMATAN KELAYANG
DESA SIMPANG KOTA MEDAN

Jalan Negara Nomor : -

email : simpangkotamedan@yahoo.com

KodePos : 29352

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 02/REKOM/2009/IV /2021

Kepala desa simpang kota medan setelah membaca surat Dinas Penanaman Modal Dan pelayanan Terpadu Satu pintu kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 57/DPMPTSP/NON IZIN-SKP/IV/2021 tanggal 22 Maret 2021 dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama : NURISMA
NIM : 11770523353
Jenis Kelamin : Perempuan
Jenjang/Jurusan : S.1 / Ilmu Administrasi Negara
Alamat : Garuda Sakti KM 3 Jl. UK Pekanbaru
Judul Penelitian : Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Simpang Kota Medan Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (Enam) bulan terhitung tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

Demikian Surat Rekomendasi ini di berikan agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait di harapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan penelitian ini, terima kasih.

Di keluaran di: Simpang Kota Medan
Pada Tanggal : 05 April 2021
Kepala Desa Simpang Kota Medan





RIWAYAT PENELITI

Nama Lengkap Nurisma lahir di Polak Pisang 1, Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, 24 Februari 1999 anak dari Bapak Busro dan Ibu Robina. Peneliti merupakan anak 1 dari 3 bersaudara. Peneliti menempuh pendidikan di SDN 013 Polak Pisang 1 (lulus tahun 2011) melanjutkan ke SMPN Kelayang (lulus tahun 2014) dan melanjutkan ke SMAN 1 Kelayang (lulus tahun 2017) hingga akhirnya menempuh masa kuliah di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska Riau). Dengan ketekunan dan motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Simpang Kota Medan Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu”

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

karya tulis ini tanpa menanggung beban dan menanggung sumber.